

# Pokok-Pokok Pikiran Pelaksanaan Rekonsiliasi Dalam Masyarakat Maluku

Oleh : Kolpol. Dra. Roosiana S.  
Abli Utama Dislibang Polri  
(Anggota Tim Khusus ABRI penanganan Ambon)



## PENDAHULUAN

Kerusuhan yang terjadi pada tanggal 19 Januari 1999 telah meninggalkan pengaruh yang dalam dan luas bagi masyarakat kota/pulau Ambon dan Maluku umumnya karena telah mengakibatkan korban jiwa, luka parah dan ringan, kehilangan rumah dan harta benda. Malah yang lebih memprihatinkan adalah rusaknya tatanan nilai sosial budaya Maluku. Rasa curiga dan dendam masih belum

hilang dari masyarakat. Dengan kondisi demografis Maluku di mana jumlah penduduk yang beragama Kristen hampir berimbang dengan penduduk yang beragama Islam, maka kerusuhan yang berkelanjutan akan mendatangkan malapetaka bagi kedua pihak yang bertikai. Karena itu kami berpendapat sudah waktunya bagi semua pihak yang terlibat konflik untuk bekerja sama dalam memulihkan keamanan dan ketenangan hidup seluruh penduduk kota/pulau Ambon dan Maluku umumnya.

Upaya penyelesaian dirasakan mendesak, namun disadari bahwa upaya tersebut harus didasarkan pada upaya mengatasi sebab-sebab utama kerusuhan

tersebut. Dengan cara demikian diharapkan situasi dan kondisi aman akan tercipta yang memungkinkan berkembangnya kehidupan sesama yang dinamis, yang tidak rentan terhadap aksi provokator.

## IDENTIFIKASI MASALAH

Ada berbagai pandangan tentang motif kerusuhan yang berkembang di Maluku dan di luar Maluku. Pandangan-pandangan tersebut tampaknya melampaui realitis yang sebenarnya. Menurut hemat kami ada dua hal mendasar yang perlu mendapat perhatian :

Memperhatikan berbagai kerusuhan yang terjadi di tanah air, seperti di Situbondo, Tasikmalaya, Ujung Pandang, Ketapang, Kupang dan lain-lain, maka dapat dikatakan bahwa kerusuhan-kerusuhan tersebut memiliki pola yang mirip, yaitu peristiwa kriminal biasa yang berkembang menjadi konflik yang bernuansa SARA khususnya pada sisi agama. Kemiripan tersebut memberi dasar bagi kita untuk menyimpulkan bahwa kerusuhan di Ambon dengan menggunakan kemasam yang sangat menarik yaitu kemasam agama namun didalam kemasam tersebut berisikan macam-macam hal

dan kemungkinan besar adalah rekayasa elit politik. Dengan demikian pihak-pihak yang terlibat konflik berdarah harus dilihat sebagai civitim dari suatu political crime.

Banyak orang bertanya, bagaimana mungkin masyarakat Maluku yang memiliki tata-tatanan nilai-nilai agama dan sosial budaya (pela dan gandong) dapat terlibat dalam konflik berdarah yang sangat mengerikan. Tetapi bagi setiap orang yang peka terhadap perkembangan masyarakat, dapat dicatat paling kurang tiga hal yang melonggarkan nilai-nilai sosial budaya yang sebelumnya menjadi unsur kohesif dalam hidup masyarakat Maluku.

Masyarakat Maluku memang memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat, seperti tampak dalam hubungan pelagandong yang terjadi antara desa-desa Kristen maupun antara desa Kristen dan desa Islam. Bahkan keterbukaan masyarakat desa Kristen terhadap para pendatang (umumnya suku Buton) bukan saja telah memungkinkan para pendatang menjadi penduduk desa, tetapi juga mendirikan Mesjid di desa mereka, misalnya di desa Waai, Eri, Airlow dan lain-lain. Kini penduduk Maluku terdiri dari berbagai suku di Indonesia. Setiap suku memiliki nilai-

nilai budayanya masing-masing. Kondisi ini tidak memungkinkan penerapan nilai-nilai sosial budaya Maluku secara merata, kecuali nilai-nilai tersebut dihargai, dihayati dan diberlakukan oleh semua unsur dalam masyarakat Maluku.

Di zaman orde baru agama memperoleh tempat yang tinggi bahkan diperlakukan sebagai suatu kekuatan yang berhadapan dengan pemerintah sehingga diperlukan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Di pihak lain, agama yang dilihat sebagai memiliki kekuatan, dipakai sebagai kendaraan politik. Dalam kondisi seperti ini, maka tekanan lebih banyak diletakkan pada unsur-unsur yang membedakan suatu agama dari agama yang lain. Hal ini antara lain tampak dengan adanya larangan terhadap saudara-saudara Islam untuk menghadiri perayaan Natal dan bahkan menyampaikan ucapan selamat Natal kepada saudara-saudara Kristennya. Larangan seperti ini pada gilirannya melonggarkan ikatan kekerabatan. Akibatnya kegiatan saling membantu dalam membangun rumah ibadah, yang menjadi ciri khas masyarakat Maluku, kini menjadi mustahil dilakukan. Mereka yang dulu saling menerima

sebagai saudara, kini saling curiga sebagai musuh. Sikap masyarakat pendatang khususnya BBM sulit menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat setempat dan senantiasa menerapkan budaya tempat aslinya.

Agama memang berbeda satu sama lain, dimana kalau ada 10 Perbedaan maka masih ada ribuan persamaan. Tetapi dalam penyebaran agama kepada pemeluknya lebih menekankan pada perbedaan-perbedaan saja. Hal inilah menyebabkan tidak ada titik temu dan bahkan memperlebar jurang pemisah.

#### REKONSILIASI

Melihat kerugian yang diderita masyarakat begitu hebat, maka upaya rekonsiliasi menjadi hal yang sangat mendesak. Kami yakin setiap agama mengajarkan kebaikan kepada penganutnya. Karena itu perlu dikembangkan nilai-nilai positif masing-masing agama yang melandasi upaya rekonsiliasi, antara lain :

Setiap agama tentu mengajarkan untuk mengasihani sesama manusia sebagai wujud iman kita kepada Allah yang satu. Dan kasih terhadap sesama manusia ini melampaui batas-batas suku, agama, ras dan golongan.

Banyak diantara kita yang kehilangan orang-orang yang kita cintai, kehilangan rumah dan harta benda, serta mengalami luka parah dan ringan. Karena itu dapat dimengerti bahwa di hati banyak saudara masih ada rasa permusuhan dan keinginan untuk membalas dendam. Namun sebagai manusia yang berdosa yang setiap kali memperoleh pengampunan dari Allah, maka hendaknya kita pula saling mengampuni dan membebaskan diri kita dari persasaan mendendam.

Allah menghendaki keadilan diberlakukan sampai kepada masyarakat kecil yang paling bawah. Karena itu perdamaian yang diupayakan harus berarti pula peninggakan keadilan dan kebenaran.

Ada baiknya kita berdoa untuk kota/pulau Ambon dan Maluku serta Indonesia yang kita diami bersama dan mengusahakan kesejahteraan, sebab kesejahteraan Maluku dalam negara Kesatuan Indonesia berarti kesejahteraan kita pula. Selain itu nilai-nilai positif yang dapat dikembangkan dari agama kita masing-masing, maka ke-Indonesiaan kita harus memampukan kita untuk menerima kemajemukan masyarakat Indonesia, baik suku, agama maupun

budaya. Semua agama memiliki hak hidup yang sama di bumi Indonesia. Dan setiap warga negara memiliki hak hidup yang sama di bumi Indonesia. dan setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kita hindari dominan mayoritas maupun tirani minoritas.

## LANGKAH - LANGKAH II REKONSILIASI

Upaya rekonsiliasi harus melibatkan dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah, para tokoh agama, adat dan masyarakat. Pemerintah diharapkan segera menyusun jadwal tinakan yang konkrit baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk itu disampaikan usul sebagai berikut :

### Dewan Perwakilan Rakyat

Para anggota DPR tingkat I dan tingkat II hendaknya tampil sebagai wakil rakyat dan bukan sekedar utusan fraksi. Keberpihakannya kepada rakyat diharapkan akan mendorong Dewan bertindak pro-aktif dalam menampung aspirasi rakyat dan membela kepentingan rakyat. Karena itu para wakil rakyat perlu menjadwalkan kunjungan berkala ke tempat / desa-desa yang mengalami kerusakan hebat. ke

lokasi-lokasi penampungan dan ke-  
rumah-rumahan - tahanan - untuk  
mendengar keluhan, keceemasan dan  
harapan rakyat untuk ditindaklanjuti  
sehingga keadilan dan damai sejahtera  
dapat diberlakukan terhadap seluruh  
masyarakat dan bangsa Indonesia.

### Pemerintah

Peranan pemerintah jelas sangat penting.  
Karena itu pemerintah dihimbau untuk  
tidak melanjutkan politik adu domba  
yang dipraktekkan Orde Baru dan tidak  
tergoda untuk menjadikan agama  
sebagai kendaraan politik. Sejalan  
dengan itu diharapkan pemerintah tidak  
diskriminatif dalam menampung aspirasi  
rakyat dan dalam menetapkan  
kebijaksanaannya. Pemerintah daerah  
Mauluk diharapkan untuk tidak  
menggunakan pola dan gandong sebagai  
slogan-slogan kosong melainkan secara  
taat azas (konsisten) menjabarkan nilai-  
nilai luhur yang terkandung dalam pola  
dan gandong dalam seluruh  
kebijaksanaannya. Keadilan dan  
kebenaran serta hukum harus dapat  
ditegakkan. Sebab setiap masyarakat  
yang merasa diperlakukan tidak adil  
akan rentan terhadap kerusuhan sosial.  
Program jangka pendek yang dapat  
dilakukan adalah mengumpulkan para  
tokoh agama, masyarakat dan adat

untuk berdialog tentang langkah-  
langkah rekonsiliasi. Sedangkan untuk  
jangka panjang pemerintah daerah dapat  
terus berusaha untuk memberlakukan  
kembali pemerintah adat. Sebab UU No.  
5 tahun 1974 membawa dampak yang  
besar terhadap kehidupan berbudaya di  
Maluku. Disamping itu dalam seluruh  
kebijaksanaannya ke depan pemerintah  
diharapkan dengan sungguh  
memperhatikan rasa keadilan  
masyarakat. Sebab hanya dengan  
menegakkan keadilan dan kebenaran  
dimana setiap anggota masyarakat  
memiliki kedudukan yang sama di  
hadapan hukum, maka harmoni dalam  
kehidupan masyarakat dapat terpelihara.

### Aparat Keamanan

Peranan aparat keamanan dalam  
menciptakan ketenangan dan ras aman  
masyarakat sangat dirasakan  
manfaatnya. Masyarakat mengandalkan  
aparat keamanan untuk menjamin  
keamanan dan ketenangan hidup dan  
berusaha/bekerja. Karena itu aparat  
diharapkan tidak berpihak pada salah  
satu golongan. Dalam rangka  
mendorong masyarakat mengambil  
inisiatif untuk mengupayakan  
perdamaian, maka pendekatan represif  
harus diganti dengan pendekatan

lokasi-lokasi penampungan dan ke-  
rumah-rumahan (tahanan) untuk  
mendengar keluhan, keceemasan dan  
harapan rakyat untuk ditindaklanjuti  
sehingga keadilan dan damai sejahtera  
dapat diberlakukan terhadap seluruh  
masyarakat dan bangsa Indonesia.

### Pemerintah

Peranan pemerintah jelas sangat penting.  
Karena itu pemerintah dihibau untuk  
tidak melanjutkan politik adu domba  
yang dipraktekkan Orde Baru dan tidak  
tergoda untuk menjadikan agama  
sebagai kendaraan politik. Sejalan  
dengan itu diharapkan pemerintah tidak  
diskriminatof alam menampung aspirasi  
rakyat dan dalam menetapkan  
kebijaksanaannya. Pemerintah daerah  
Mauluk diharapkan untuk tidak  
menggunakan pola dan gandong sebagai  
slogan-slogan kosong melainkan secara  
taat azas (konsisten) menjabarkan nilai-  
nilai luhur yang terkandung dalam pola  
dan gandong dalam seluruh  
kebijaksanaannya. Keadilan dan  
kebenaran serta hukum harus dapat  
ditegakkan. Sebab setiap masyarakat  
yang merasa diperlakukan tidak adil  
akan rentan terhadap kerusuhan sosial.  
Program jangka pendek yang dapat  
dilakukan adalah mengumpulkan para  
tokoh agama, masyarakat dan adat

untuk berdialog tentang langkah-  
langkah rekonsiliasi. Sedangkan untuk  
jangka panjang pemerintah daerah dapat  
terus berusaha untuk memberlakukan  
kembali pemerintah adat. Sebab UU No.  
5 tahun 1974 membawa dampak yang  
besar terhadap kehidupan berbudaya di  
Maluku. Disamping itu dalam seluruh  
kebijaksanaannya ke depan pemerintah  
diharapkan dengan sungguh  
memperhatikan rasa keadilan  
masyarakat. Sebab hanya dengan  
menegakkan keadilan dan kebenaran  
dimana setiap anggota masyarakat  
memiliki kedudukan yang sama di  
hadapan hukum, maka harmoni dalam  
kehidupan masyarakat dapat terpelihara.

### Aparat Keamanan

Peranan aparat keamanan dalam  
menciptakan ketenangan dan ras aman  
masyarakat sangat dirasakan  
manfaatnya. Masyarakat mengandalkan  
aparat keamanan untuk menjamin  
keamanan dan ketenangan hidup dan  
berusaha/bekerja. Karena itu aparat  
diharapkan tidak berpilihak pada salah  
satu golongan. Dalam rangka  
mendorong masyarakat mengambil  
inisiatif untuk mengupayakan  
perdamaian, maka pendekatan represif  
harus diganti dengan pendekatan

## Masyarakat

Rekonsiliasi harus melibatkan seluruh masyarakat. Karena sosialisasi perdamaian harus sampai pada lapisan masyarakat yang paling bawah. Pada tingkat ini bukan saja ketua RT dan RW yang dilibatkan, melainkan juga masyarakat paling bawah dan terutama para pemuda.

Rekonsiliasi dapat berbentuk :

“Bikin panas pela” di kota Ambon antara negeri Kristen dan Islam yang memiliki hubungan pela gandong.

Angkat pela atau angkat saudara dalam satu lingkungan dan antar lingkungan/ desa yang beragama Kristen dengan lingkungan / desa yang beragama Islam. Misalnya Mardika dan Batumerah; Waehaong-Soabali dengan Pohon Pule-lalake; Bagugajah dengan Diponegoro ; antara Hitu-Mamala-Morela dengan Hunuth-Durian Patah-Nania-Negeri Lama ; dan lain-lain.

Membuat ikrar perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Adanya sosialisasi adat istiadat Maluku kepada masyarakat pendatang agar mereka dapat mengerti dan menyesuaikan diri.

## Pers

Peranan pers sangat besar dalam membentuk opini masyarakat. Karena itu para pemimpin redaksi media massa cetak dan elektronik, lokal dan nasional agar menyajikan berita-berita yang turut menciptakan suasana cinta damai. Berita-berita yang disajikan didasarkan atas kebenaran sehingga tidak memojokkan siapapun. Karena itu setiap berita sebelum disajikan diadakan dulu pengecekan silang sehingga akurasi dapat dipertanggung-jawabkan.

Demikian pokok-pokok pikiran yang disampaikan kepada semua pihak dengan harapan semoga berfaedah dalam memulihkan situasi kota Ambon manise, keamanan dan ketentraman dari seluruh masyarakat Maluku maupun bangsa Indonesia umumnya.

Jakarta, 7 Juli 1999

AHLI UTAMA DISLITBANG POLRI

Dra. ROOSIANA S.

KOLONEL POLISI NRP 54090004